

Kesadaran Komunitas Lokal Untuk Pengembangan Pariwisata Inklusif di Desa Tegaren, Trenggalek

Praja Firdaus Nuryananda¹, Herlina Suksmawati², Leily Suci Rahmatin³

^{1, 2, 3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: firdaus.praja@gmail.com

ABSTRACT

At this time, it is important to build tourism based on awareness of the importance of inclusivity. This article is a summary publication of community service activities in the Tegaren, Trenggalek, East Java. The executive team tried to take the essence of a series of community service activities that had been carried out. The essence of this activity is divided into two, they are 1) that awareness of inclusivity in Tegaren has emerged long ago, namely concurrent with the initiation of a tourism village, and 2) awareness of inclusivity ultimately makes collaboration with stakeholders very helpful and can assist Tegaren in designing the next concrete steps to develop tourism in the village, one of which is through a virtual tour. The executive team uses participatory approaches in designing, implementing, and evaluating community service programs in Tegaren. The approaches are participatory rural appraisal (PRA), asset-based community development (ABCD), collaborative partnerships, and community-based tourism (CBT). By using a lot of participatory approaches, it means that the executive team also places an important role on the community or local people in Tegaren. The increasingly important role played by the local community or society which then simultaneously fosters collective awareness, such as awareness of inclusivity.

Keyword: *Tegaren, inclusivity, awareness, local community, virtual tour*

ABSTRAK

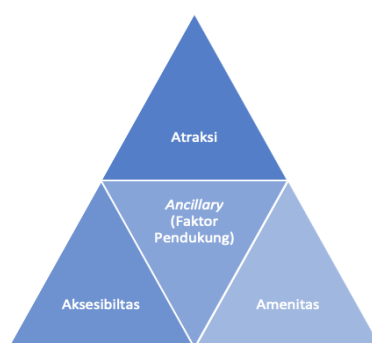
Pada masa sekarang ini, penting kiranya untuk membangun kepariwisataan yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya inklusivitas. Artikel ini merupakan publikasi rangkuman kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wisata Tegaren, Kab. Trenggalek, Jawa Timur. Tim pelaksana program mencoba untuk mengambil intisari dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Adapun intisari dari kegiatan tersebut terbagi menjadi dua, yakni 1) bahwa kesadaran inklusivitas di Tegaren telah muncul lama, yakni berbarengan dengan dirintisnya desa wisata, dan 2) adanya kesadaran akan inklusivitas tersebut akhirnya membuat kolaborasi dengan para *stakeholders* sangat terbantu dan dapat membantu Tegaren dalam merancang langkah konkret selanjutnya untuk mengembangkan pariwisata di desa, salah satunya melalui *virtual tour*. Tim pelaksana program menggunakan pendekatan partisipatoris dalam merancang, melaksanakan, serta melakukan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat di Tegaren. Adapun pendekatan tersebut adalah *participatory rural appraisal* (PRA), *asset-based community development* (ABCD), *collaborative partnership*, dan *community-based tourism* (CBT). Dengan menggunakan banyak pendekatan partisipatoris, artinya tim pelaksana juga meletakkan peran penting pada komunitas atau masyarakat lokal di Tegaren. Peran yang semakin penting oleh komunitas atau

masyarakat lokal ini yang kemudian secara simultan menumbuhkan kesadaran-kesadaran kolektif, seperti kesadaran akan inklusivitas.

Kata Kunci: Tegaren, inklusifitas, kesadaran, komunitas lokal, *virtual tour*

1. PENDAHULUAN

Perencanaan dan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari empat aspek karakteristik utama pembentuk daya tarik wisata, baik berupa atraksi, amenitas, akses, maupun *ancillary*. Ketersediaan dan kelayakan dari masing masing aspek pembentuk pariwisata dapat berimplikasi terhadap kualitas pariwisata dan target wisatawan yang diharapkan datang berkunjung. Destinasi wisata yang memiliki atraksi unik dan beragam mampu menarik perhatian calon wisatawan. Misalnya, keindahan alam, warisan budaya, peristiwa budaya, dan kegiatan rekreasi yang menarik dapat menjadi atraksi utama suatu daerah (Millenia, Sulivinio, Rahmanita, & Osman, 2021). Selain atraksi, amenitas juga memainkan peran penting dalam menentukan pengalaman wisatawan. Fasilitas akomodasi, rumah makan, toko souvenir dan infrastruktur pendukung lainnya sangat penting dalam menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan selama berkunjung. Tersedianya fasilitas yang memadai dapat meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan dan membuat mereka ingin kembali lagi di masa yang akan datang (Nawang Sari, Muryani, & Utomowati, 2018). Aksesibilitas ke destinasi wisata juga menjadi faktor penting dalam menentukan potensi kunjungan wisatawan. Prasarana transportasi yang baik seperti jalan raya, bandara dan sarana transportasi umum dapat mempermudah akses wisatawan menuju lokasi yang diinginkan (Nurbaeti, Rahmanita, Ratnaningtyas, & Amrullah, 2021). *Ancillary* atau faktor pendukung lainnya juga berperan dalam mempengaruhi daya tarik suatu destinasi wisata. Ini termasuk layanan informasi wisata, keamanan, kebersihan lingkungan, dan aspek lain yang dapat mempengaruhi keseluruhan pengalaman wisatawan (Setyanto & Pangestu, 2019). Secara keseluruhan, perencanaan dan pengembangan pariwisata yang baik harus mempertimbangkan keempat aspek karakteristik utama tersebut secara seimbang.



Gambar 1. Ilustrasi skema 4A dalam Pariwisata.

Sumber: Ilustrasi Pribadi.

Mengingat bahwa pariwisata juga bisa menjadi hak bagi setiap individu, maka dengan memastikan ketersediaan, kecukupan dan peningkatan kualitas di setiap aspek, sebuah destinasi pariwisata memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menarik wisatawan dan meningkatkan kontribusi ekonomi dan sosial bagi daerah tersebut. Akan tetapi perkembangan pariwisata di Indonesia belum sepenuhnya adil dan proporsional.

Ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi kelompok masyarakat dengan disabilitas atau yang sering disebut penyandang disabilitas untuk sepenuhnya menikmati manfaatnya. John Rawls mengatakan dalam keadilan dengan segala kejujuran dalam berpendapat dan berkeputusan tanpa ada diskriminasi dan ketidak-jujuran (*justice as fairness*) adalah antara lain persamaan kesempatan. Akan tetapi apabila terpaksa harus melakukan politik perbedaan (*discriminating policy*) hanya boleh dilakukan demi keuntungan bagi yang paling kurang beruntung (*for advantage for the least advantage*) (Rawls, 1971). Kendati yang di maksud Rawls di sini merupakan masyarakat miskin dan terbelakang, akan tetapi penyandang disabilitas dapat juga masuk kedalamnya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 (Pertimbangan Poin B) yang menyatakan bahwa “sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas”. Oleh karena itu, untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan minat khusus, seperti untuk wisatawan dengan disabilitas, destinasi pariwisata diharapkan dapat memenuhi harapan para wisatawan yang datang, terutama bagi kelompok masyarakat yang mungkin dianggap terpinggirkan dan memiliki kekhasan serta ciri khusus. Ini juga berlaku untuk penyandang disabilitas yang sering kali dilupakan dan perempuan yang biasanya hanya dianggap sebagai pekerja rumahan. Oleh sebabnya pariwisata harus dikembangkan juga secara inklusif.

Pengembangan pariwisata inklusif diartikan sebagai paradigma yang berkembang untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dapat menikmati aktivitas pariwisata baik sebagai “*house*”, yakni masyarakat lokal, maupun “*guest*”, wisatawan dengan kebutuhan tertentu. Hal ini tidak terkecuali untuk para penyandang disabilitas yang selama ini sering terlupakan keberadaannya dan perempuan yang dianggap sebagai pekerja di rumah. Kelompok difabel dan masyarakat marjinal lainnya tergolong salah satu kelompok yang seakan-akan keberadaannya tidak diakui dalam industri pariwisata. Mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak memerlukan kegiatan berwisata. Ketidak-ramahan industri pariwisata terhadap penyandang disabilitas tampak pada minimnya ketersediaan informasi, transportasi, akomodasi, atraksi, infrastruktur, dan pelayanan (Das & Rudra, 2015) (Michopolou, Darcy, Ambrose, & Buhalis, 2015) (Darcy & Dickson, 2009).

Kesadaran akan kebutuhan pengembangan kepariwisataan yang mendukung para difabel tersebut yang juga sedang dikembangkan oleh masyarakat [Desa Wisata Tegaren](#), Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Desa Wisata Tegaren adalah salah satu desa dari 150-an desa di Kabupaten Trenggalek. Mayoritas warga desa bekerja sebagai petani. Pada musim penghujan, para petani di Tegaren bercocoktanam dengan padi, dan pada musim kemarau mereka menggantinya dengan jagung, singkong, dan tembakau. Sedangkan ada pula perempuan-perempuan paruh baya yang masih memproduksi *beseq* (tempat dari bambu) untuk membantu perekonomian keluarga. Kerajinan bambu berupa *beseq*, memang masih banyak dijumpai di Tegaren, terutama di dusun Tompe. Desa Wisata Tegaren memiliki Embung Banyu Lumut sebagai atraksi utama wisata desa. Desa Wisata Tegaren juga telah menetapkan sekaligus mendokumentasikan Rencana Induk (*Master Plan*) Desa Wisata Tegaren 2019-2031. Dokumen tersebut menjadi modal bagi masyarakat Tegaren untuk mengembangkan pariwisatanya. Sejak 2021, Desa Wisata Tegaren juga telah mendapatkan beberapa prestasi, yakni salah satu pemenang Anugerah Seratus Desa Wisata (Sadewa) Kabupaten Trenggalek pada 2022 dan secara konsisten masuk dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada 2022 dan 2023

ini (Nuryananda, Mijiarto, Alawi, & Wahyuni, 2023). Namun dengan adanya prestasi-prestasi tersebut, Desa Wisata Tegaren semakin meluaskan cakrawala wawasannya dengan memperjuangkan *pro-poor tourism* yang juga mendukung pariwisata inklusif dan masuk dalam poin Rencana Induk Desa Wisata Tegaren 2019-2031 (Nuryananda, Utami, Anggresta, Darono, & Rikza, 2021).

Salah satu upaya inklusi pariwisata yang dicoba dilaksanakan di Desa Wisata Tegaren ada tiga, yakni 1) pembenahan infrastruktur kepariwisataan, 2) pembuatan *virtual tour* yang ramah difabel, dan 3) sosialisasi tentang pentingnya menciptakan pariwisata yang inklusif. Ketiga upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Wisata Tegaren, namun juga terdapat beberapa kegiatan yang juga bekerjasama dengan pihak luar, seperti kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organization*). Ketiga upaya tersebut dipilih sebagai program-program inklusi yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk aspek kondisi lapangan di Desa Wisata Tegaren, kondisi keuangan desa, serta kondisi sosial yang ada di Desa Wisata Tegaren.

Artikel ini merupakan hasil atau pelaporan ilmiah dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tim penulis di Desa Wisata Tegaren, Trenggalek. Adapun program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan ABCD (*asset-based community development*), metode PRA (*participatory rural appraisal*), kemitraan kolaboratif, dan kerangka berpikir CBT (*community-based tourism*). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan juga berpedoman kepada Rencana Induk Desa Wisata Tegaren 2019-2031 sehingga setiap ada program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Tegaren juga mendukung terimplementasikannya rencana-rencana yang sudah terdokumentasikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan juga menghasilkan dua poin utama, yakni 1) pariwisata inklusif sebagai bagian yang berkelindan dengan *pro-poor tourism* masih belum banyak dipahami urgensinya oleh masyarakat Desa Wisata Tegaren sendiri, sehingga 2) Desa Wisata Tegaren masih memerlukan banyak program iterasi dan literasi tentang inklusivitas di dalam kepariwisataan.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengembangan berbasis aset komunitas atau *asset-based community development* (ABCD), sebuah pendekatan yang memberikan peran penting kepada masyarakat atau komunitas di daerah pariwisata (Dureau, 2013), adalah pendekatan pertama yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wisata Tegaren. Aset yang dimaksud dalam hal ini bermakna potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal di desa yang telah menjadi sarana untuk melakukan program pengembangan desa (Yuwana, 2022). Empat pendekatan dasar untuk memahami konsep ABCD adalah pendekatan berdasarkan masalah (*problem-based approach*), pendekatan berdasarkan hak (*rights-based approach*), pendekatan berdasarkan aset (*asset-based approach*), dan pendekatan berdasarkan kebutuhan (*needs-based approach*) (Yuwana, 2022).

Sementara itu saat ini pembangunan desa wisata bergantung pada konsep dan determinasi dari komunitas lokal atau masyarakat lokal yang ada. Pada masa sekarang, seringkali di daerah/destinasi pariwisata, komunitas lokal atau masyarakat lokal dapat berfungsi sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek pembangunan seperti sebelumnya (Russel, 2016). Program pembangunan pariwisata juga melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan hasilnya. Saat ini, setiap desa wisata membangun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, daya

saing, pembangunan berkelanjutan, dan keselarasan dengan lingkungan sebagai tujuan utama (Suksmawati, Alawi, & Nuryananda, 2022).

Sekarang ini membangun infrastruktur sosial dan fisik di daerah juga dapat dilakukan oleh komunitas lokal/masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan pengembangan pariwisata yang ada di daerah tersebut (Suksmawati, Alidyan, Febrianita, & Nuryananda, 2021). Jika pembangunan infrastruktur fisik memiliki orientasi pada jangka pendek, dengan pembangunan prasarana dan sarana fisik, sedangkan pembangunan infrastruktur sosial berorientasi pada jangka panjang. Infrastruktur sosial mencakup pemanfaatan aset potensial yang dimiliki oleh daerah dan masyarakat lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memaksimalkan aset tersebut (Dwiridotjahjono, Wibowo, & Nuryananda, 2020).

Metode lain yang digunakan adalah **PRA, atau *participatory rural appraisal***. Metode PRA berasal dari keilmuan Sosiologi yang menekankan pentingnya nilai-nilai dalam observasi partisipatif, pandangan etis (pandangan peneliti) dan emik (pandangan anggota masyarakat), serta pentingnya pembelajaran lapangan yang lebih fleksibel. PRA sendiri pada awalnya didefinisikan sebagai sebuah metode yang berusaha untuk memahami kondisi masyarakat rural dengan melibatkan dan mengambil pengetahuan dari sumber primer (masyarakat rural) itu sendiri yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat rural tersebut (Chambers, 1994). Kemudian terma masyarakat rural yang digunakan berkembang menjadi masyarakat atau komunitas lokal. Robert Chambers menuliskan ada lima metode atau pendekatan ilmiah yang bisa dijadikan referensi sebagai awal mula (jika tidak berbarengan) dengan metode PRA, yakni 1) penelitian aktivisme partisipatoris (*activist participative research*), 2) analisis agro-ekosistem (*agroecosystem analysis*), 3) antropologi terapan (*applied anthropology*), 4) penelitian lapangan tentang sistem bertani (*field research on farming system*), dan 5) penilaian rural dengan cepat (*rapid rural appraisal*) (Chambers, 1994). Namun demikian, salah satu tantangan dari PRA adalah kecepatan perubahan masyarakat yang seringkali melebihi kecepatan para peneliti dan pelaksana program untuk mempelajari secara mendalam metode ini lebih lanjut (Chambers, 1994b).

Sebenarnya dengan metode ini, tim pelaksana program pengabdian masyarakat hanya berperan sebagai fasilitator untuk aspirasi konseptual dan kegiatan tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam metode ini komunitas lokal didorong untuk mengembangkan rencana-rencana mereka sendiri, termasuk dalam penjadwalan, pendanaan, pelaksanaan tindakan/kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi. Melalui metode PRA, komunitas desa lokal tidak lagi menjadi objek penerima program dari atas (*top-down*), tetapi menjadi pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang diawasi dalam skala desa. PRA juga memungkinkan komunitas desa untuk mengungkapkan dan menganalisis kondisi mereka sendiri karena mereka diminta untuk berpartisipasi secara aktif pada setiap aktivitas pelaksanaan program. Selain itu, PRA adalah metode yang terbukti dan sangat dipercayai dalam program pemberdayaan masyarakat (Hidayana, et al., 2019). Keefektifan metode ini digunakan oleh Nimai Das untuk mewujudkan pengelolaan hutan partisipatif di kawasan rural sehingga menciptakan mata pencaharian desa yang berkelanjutan (Das N. , 2012) dan oleh Mueller untuk memahami pengetahuan etno-ekologi dan keragaman tanaman pada tingkat lokal (Mueller, 2010).

Dalam lanskap ilmu sosial dan pariwisata kontemporer, konsep **kemitraan kolaboratif (*collaborative partnership*)** telah muncul sebagai pendekatan dinamis untuk mengatasi berbagai tantangan dan peluang. Kemitraan kolaboratif dalam konteks ini

melibatkan kerja sama dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk peneliti, masyarakat lokal, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan industri pariwisata, untuk menciptakan hasil yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Melalui penelitian dan analisis interdisipliner, ilmuwan sosial menyumbangkan wawasan tentang dinamika budaya, sosial, dan ekonomi destinasi pariwisata (Ritchie, 2009). Pengetahuan ini meningkatkan pengembangan praktik pariwisata yang inklusif dan bertanggung jawab yang menghormati budaya lokal, mengurangi dampak negatif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jamal & Dredge, 2014).

Namun, mengarahkan kemitraan kolaboratif di ranah ilmu sosial dan pariwisata bukannya tanpa tantangan. Menyeimbangkan kepentingan *stakeholders* yang berbeda, memastikan partisipasi yang adil, dan mengatasi dinamika kekuasaan membutuhkan perhatian yang cermat. Pertimbangan etis, seperti kepekaan budaya, distribusi manfaat yang adil, dan penghormatan terhadap tradisi lokal, sangat penting untuk membina kemitraan yang bermakna dan bertahan lama. Contoh kemitraan kolaboratif adalah pengembangan inisiatif pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable community-based tourism*). Hasilnya adalah pengalaman wisata yang lebih autentik dan bertanggung jawab yang meningkatkan kesejahteraan penduduk sambil memberikan pengalaman yang memperkaya pengunjung. Kemitraan kolaboratif pada perhubungan ilmu sosial dan pariwisata menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan dan peluang pembangunan pariwisata berkelanjutan (Richards & Hall, 2000). Dengan menyatukan berbagai pemangku kepentingan, memanfaatkan pengetahuan interdisipliner, dan mengutamakan pertimbangan etis, kemitraan ini berkontribusi pada terciptanya pengalaman pariwisata yang saling menguntungkan, peka budaya, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.



Gambar 2. Salah satu bentuk kemitraan kolaboratif Desa Wisata Tegaren dengan *stakeholders* lainnya adalah sosialisasi dan rapat bersama untuk pengembangan kepariwisataan inklusif. Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Community-based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat berdiri di persimpangan ilmu sosial dan pariwisata. Metode ini menawarkan pendekatan transformatif untuk perjalanan yang memprioritaskan keterlibatan lokal, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan (Honey, 1999). CBT menggali esensi pariwisata berbasis masyarakat, implikasinya, tantangannya, dan potensinya, sambil menggambarkan perspektif interdisipliner yang menjembatani ilmu sosial dan pariwisata. CBT berfungsi sebagai katalis untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dengan melibatkan penduduk secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan

pengelolaan kegiatan pariwisata, CBT menumbuhkan rasa kepemilikan dan keagenan (Fennel & Malloy, 2007).

Upaya kolaboratif dalam pariwisata berbasis masyarakat sering mengarah pada hasil pembangunan berkelanjutan. Ilmuwan sosial memainkan peran penting dalam menilai dampak sosial ekonomi CBT pada komunitas lokal (Mowforth & Munt, 2016). CBT juga berhasil mencontohkan perpaduan harmonis ilmu sosial dan pariwisata, menciptakan platform untuk pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan lokal. Dengan memprioritaskan suara dan aspirasi masyarakat lokal, CBT membuka jalan bagi paradigma pariwisata yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan bermakna yang menguntungkan penduduk dan wisatawan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim penulis, metode ABCD digunakan untuk menelaah aset Desa Wisata Tegaren yang kemudian dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi desa wisata yang inklusif. Tim penulis bersama dengan masyarakat lokal Desa Wisata Tegaren menemukan bahwa salah satu aset Tegaren yang dapat mendukung desa wisata adalah gotong royong warga masyarakat di Tegaren. Hal tersebut tercermin dari banyak kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat Tegaren dengan memberdayakan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat, seperti petani besek, pembuat batu bata, pengolah kain shibori, kelompok penjual jasa *catering*, dan lainnya. Aset lainnya yang menjadikan Tegaren adalah desa wisata yang memiliki potensi untuk berkembang adalah keramahtamahan warga Tegaren terhadap orang dari luar desa mereka. Warga Tegaren sangat membuka diri mereka dan keintiman dengan warga Tegaren membuat para wisatawan terkesan sehingga memiliki perasaan khusus terhadap Tegaren. Keramahtamahan warga ini juga dikonfirmasi oleh beberapa orang yang telah diajak pergi ke Tegaren oleh tim penulis. Mereka menuturkan bahwa keramahtamahan warga Tegaren tersirat dari beberapa warga di Tegaren yang sudah hafal dan ingat dengan nama orang-orang yang beberapa kali pernah mengunjungi Tegaren. Hal tersebut tentu membuat impresi yang positif untuk para pengunjung, karena mereka merasa mendapatkan perhatian dan keramahtamahan warga desa yang jarang sekali ditunjukkan oleh penduduk di perkotaan.

Tim penulis juga tidak menemukan kesulitan atau hambatan yang berarti ketika menyampaikan aspirasi kepada warga Tegaren, dan begitu juga sebaliknya. Khususnya ketika tim penulis menyampaikan aspirasi tentang kesadaran untuk mengangkat pariwisata inklusif sebagai nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kepariwisataan. Desa Wisata Tegaren ternyata menyambut dengan positif. Beberapa perangkat desa mengatakan bahwa kesadaran tentang inklusifitas salah satunya tercermin dari adanya jalur tangga naik-turun untuk difabel di kantor desa. Sekretaris Desa, Hendrik Krisdianto, menuturkan bahwa pemerintah desa Tegaren juga telah merencanakan pembangunan infrastruktur yang inklusif di lebih banyak titik lagi, termasuk juga di tempat/destinasi wisata yang sedang dikembangkan. Pada titik ini, tim penulis/tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat merasa bahwa penggunaan metode PRA sudah menemui titik optimal. Masyarakat lokal (warga Desa Wisata Tegaren) sudah dilibatkan pada seluruh kegiatan dan menjadi subyek kegiatan tersebut. Sehingga muncul rasa memiliki (*ownership*) terhadap seluruh kegiatan yang dikolaborasikan dengan warga.

Selama ini memang Tegaren sering bermitra dengan para *stakeholders* luar untuk pengembangan desa wisata, seperti perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Dalam pemberdayaan bank sampah misalnya, Tegaren

menjadi salah satu desa binaan dari Rumah Zakat Trenggalek. Sehingga hasil dari pembinaan tersebut adalah terbentuknya bank sampah di RT. 5 Dusun Krajan, Desa Tegaren. Selama ini bank sampah tersebut dikelola oleh para warga perempuan yang ada di RT. 5 Desa Tegaren. Sementara itu Desa Tegaren juga menjalin kerjasama dengan Yayasan Abyakta Acitya Bhumi (Akta Bumi) yang menjadi pendamping pengembangan desa wisata dan kepariwisataan di Desa Tegaren.

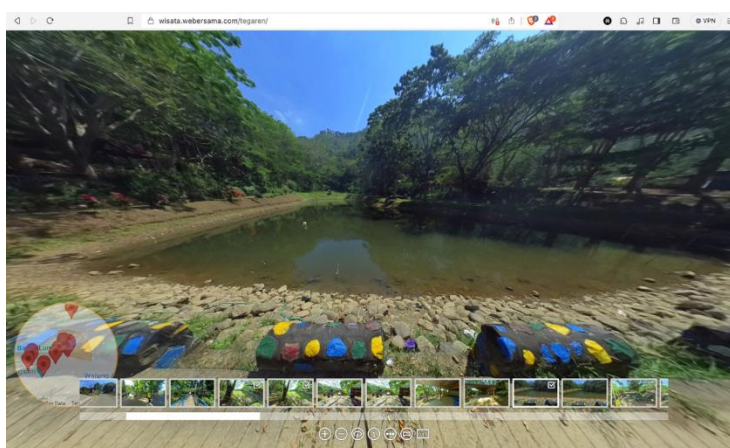
Melalui konsep *collaborative partnership*, pada tahun 2021 yang lalu Desa Tegaren bersama dengan Akta Bumi dan Aplikasi Museum Virtual Indonesia (Simvoni) bekerjasama untuk membentuk *virtual tour* yang nantinya dapat menjadi salah satu perkembangan inovasi digital pariwisata di Tegaren sekaligus menjadi langkah nyata usaha bersama dalam pengembangan pariwisata inklusif. Dengan adanya *virtual tour* ini, para *stakeholders* berupaya untuk mendekatkan pariwisata Tegaren kepada publik luas. Hal ini dikarenakan program *virtual tour* dikembangkan pada saat masa Pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Dengan inisiatif dan aspirasi awal untuk mendekatkan pariwisata Tegaren kepada khalayak luas, sekarang ini *virtual tour* yang telah dibangun mendapatkan aspirasi tambahan, yakni sebagai media para difabel untuk mengenali pariwisata yang ada di Tegaren. Oleh karena itu, tim pengembang *virtual tour* telah melakukan optimalisasi berupa penambahan audio alam yang berasal otentik dari kawasan Embung Banyu Lumut di Tegaren. Adanya penambahan audio ini bertujuan untuk dapat mengenalkan pariwisata Embung Banyu Lumut di Tegaren bagi para wisatawan difabel.

Adapun langkah-langkah yang telah dirumuskan bersama oleh para *stakeholders*, termasuk masyarakat desa, perguruan tinggi, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat, akan diambil langkahnya bertahap selama tiga tahun ke depan sampai 2025. Pada tahun 2023 ini para *stakeholders* akan memfokuskan diri pada pengembangan pariwisata Tegaren sesuai dengan yang direncanakan dan dituliskan pada dokumen Rencana Induk Desa Wisata Tegarem 2019-2031. Selain itu, upaya untuk memasukkan nilai inklusivitas ke dalam kepariwisataan Tegaren dimulai dengan sosialisasi dan penyuluhan terjadwal kepada masyarakat Tegaren. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan kesadaran penuh (*comprehensive awareness*) pada masyarakat lokal sebagaimana telah disebutkan dalam pendekatan PRA, ABCD, dan CBT. Dengan adanya perluasan kesadaran oleh masyarakat Tegaren beserta para *stakeholders*, maka diharapkan hal tersebut akan mempermudah langkah penerapan nilai-nilai inklusivitas di pariwisata Tegaren pada tahun 2024 dan 2025 ke depan.



Gambar 3. Musyawarah bersama pemerintah desa, BPD, BUMDes, dan Pokdarwis beserta para *stakeholders* untuk menjadikan Tegaren sebagai desa wisata yang inklusif.

Pada tahun 2024, warga Tegaren dan para *stakeholders* yang terlibat telah sepakat untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata yang lebih inklusif, terutama di kawasan Embung Banyu Lumut. Hal tersebut meliputi pembuatan jalan masuk ke *homestay* dengan lantai naik-turun yang ramah bagi difabel, menyediakan fasilitas audio di *homestay* dan di Embung Banyu Lumut untuk para tuna netra, serta mengadakan festival dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan toleransi dalam bermasyarakat. Langkah ini telah disepakati untuk membiasakan warga Tegaren dengan keramahtamahan yang menjadi sentral nilai dalam pariwisata, serta menjadikan masyarakat Tegaren sepenuhnya toleran sehingga dapat menjadi cerminan Pancasila dan budaya bangsa Indonesia. Kesadaran ini perlu dibangun dan dinarasikan dengan baik, sehingga masyarakat Tegaren juga dapat berkembang secara budaya dan olah pikir yang relevan dengan zaman. Relevansi ini akan memberikan resiliensi (ketahanan) terhadap pariwisata yang sedang dikembangkan oleh masyarakat Tegaren untuk bisa memberi nilai tambah di masa depan. Dengan tahapan pada 2024, maka tahun 2025 masyarakat Tegaren bersama *stakeholders* telah menyepakati bahwa tahun tersebut akan digunakan untuk mengukut keberhasilan rencana pengembangan pariwisata inklusif di Desa Tegaren. Bersamaan dengan hal tersebut, dalam rangka untuk melengkapi pembangunan infrastruktur inklusif di Tegaren, maka mulai tahun 2023 sampai 2024 tim pengembang pariwisata Tegaren juga akan mengoptimalkan peranan *virtual tour* sebagai salah satu media pariwisata yang inklusif.



Gambar 4. *Virtual tour Embung Banyu Lumut* yang akan dilengkapi dengan audio untuk lebih ramah bagi para tuna netra. Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Dalam musyawarah desa telah disepakati bahwa *virtual tour* juga memainkan peran penting dalam memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dan menikmati dunia pariwisata. Pengalaman digital yang imersif ini mendobrak hambatan fisik dan membuka dunia eksplorasi yang mungkin tidak dapat diakses oleh individu dengan tantangan mobilitas atau gangguan sensorik. Dengan menyediakan *virtual tour* ke tujuan wisata di Tegaren, masyarakat Tegaren dan juga para *stakeholders* berharap dapat memberikan layanan bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjalanan wisatanya di Desa Wisata Tegaren. Gagasan tersebut tidak hanya mempromosikan inklusivitas tetapi juga memupuk rasa keterhubungan dengan warisan budaya dan alam kita bersama di desa. *Virtual Tour* tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga mendorong pengalaman pariwisata yang lebih beragam dan diperkaya, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjelajahi dan menghargai keindahan dan sejarah yang ditawarkan sebuah

destinasi pariwisata kepada kita.

4. KESIMPULAN

Tim penulis menyertakan dua kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat pembentukan pariwisata inklusif di Tegaren. Kedua kesimpulan tersebut adalah 1) aspirasi inklusivitas dalam pariwisata di Tegaren telah lama ada, namun eksistensi tersebut belum terlembagakan dengan baik karena belum meratanya kesadaran akan inklusivitas untuk pariwisata dan 2) masyarakat Tegaren beserta para *stakeholders* telah merumuskan langkah konkret untuk mewujudkan pariwisata Tegaren yang lebih inklusif. Beberapa langkah konkret yang ditetapkan tersebut adalah pembenahan infrastruktur yang lebih ramah terhadap para difabel, khususnya di beberapa titik destinasi wisata, dan pengembangan *virtual tour* sebagai media untuk para wisatawan difabel. Hal ini juga menjadi tanda bahwa kesadaran inklusif di Tegaren juga didukung oleh kesadaran bahwa harus ada langkah dan dukungan konkret terhadap kesadaran inklusif tersebut.

Adanya kesadaran tentang pentingnya pariwisata inklusif di Tegaren merupakan satu hal yang patut diapresiasi. Dengan status Tegaren sebagai desa berkembang, mungkin tidak banyak desa dengan status yang sama yang memiliki kesadaran tentang pariwisata inklusif (atau hanya inklusivitas). Dengan adanya kesadaran awal ini, maka tidak heran jika banyak elemen di Tegaren juga bisa menetapkan langkah konkret untuk pengembangan pariwisata inklusif selanjutnya. Kondisi seperti yang dijelaskan juga membuat para *stakeholders* yang berkolaborasi dalam pengembangan desa wisata lebih mudah untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Dengan kondisi yang serba mendukung, tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat berharap semua yang telah dilakukan dan dirancang kedepannya tidak akan mengalami kendala yang besar.

Pengalaman melaksanakan program pengabdian masyarakat di Tegaren dengan tema pariwisata inklusif ini telah meluaskan horizon pengetahuan, khususnya oleh tim pelaksana sendiri. Bahwa kesadaran tentang inklusivitas ternyata tidak hanya dimiliki oleh masyarakat yang bermukim di kawasan urban saja, namun lebih dari itu masyarakat yang tinggal di daerah rural pun sekarang mulai memahami pentingnya kesadaran akan inklusivitas. Bagi tim pelaksana program, hal tersebut adalah satu hal positif yang perlu diapresiasi. Hal itu menandakan bahwa mulai ada ritme informasi yang sama antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan, setidaknya dalam hal kesadaran tentang inklusivitas. Tim pelaksana berharap dapat melanjutkan serta meningkatkan program yang serupa di desa-desa yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, Vol. 22, No. 7, 953-969.
2. Chambers, R. (1994b). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. *World Development*, Vol. 22, No. 10, 1437-1454.
3. Darcy, S., & Dickson, T. J. (2009). A Whole-of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 16, 32-44.
4. Das, S., & Rudra, R. (2015). Tourism Accessibility for Disabled Travelers: An Optimistic Concept on Tourism Industry in Bangladesh. *International Journal of Advancements in Research & Technology*, 4(10), 37-48.
5. Das, N. (2012). Agricultural & Applied Economies Association Impact of Participatory Forestry Program on Sustainable Rural Livelihoods: Lessons from

- an Indian Province. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 34(3), 428-453.
6. Dureau, C. (2013). *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*.
 7. Dwiridotjahjono, J., Wibowo, P., & Nuryananda, P. F. (2020). Bamboonomic: Ekonomi Bambu Pendukung Desa Wisata Tegaren. *JUMPA: Jurnal Master Pariwisata*, Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2020.v06.i02.p01>.
 8. Fennel, D. A., & Malloy, D. (2007). *Codes of Ethics in Tourism*. Bristol: Channel View Publications.
 9. Honey, M. (1999). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* Washington: Island Press.
 10. Hudayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Dyah, M., Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, Vol. 2, No. 2.
 11. Jamal, T., & Dredge, D. (2014). Tourism and Community Development Issues. In R. Sharpley, & D. Telfer, *Tourism and Development* (pp. 178-204). Bristol: Channel View Publications.
 12. Michopolou, E., Darcy, S., Ambrose, I., & Buhalis, D. (2015). Accessible tourism futures: the world we dream to live in and the opportunities we hope to have. *Journal of Tourism Futures*, Vol. 1, No. 3, 179-188.
 13. Millenia, J., Sulivinio, S., Rahmanita, M., & Osman, I. (2021). Strategi Pengembangan Wisata Mangrove Desa Sedari Berbasis Analisis 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Services). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 26, No. 3, 284-293.
 14. Mowforth, M., & Munt, I. (2016). *Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World*. London: Routledge.
 15. Mueller, J. (2010). Evaluating Rapid Participatory Rural Appraisal as an Assessment of Ethnoecological Knowledge and Local Biodiversity Patterns. *Conservation Biology*, 24(1).
 16. Nawangsari, D., Muryani, C., & Utomowati, R. (2018). Pengembangan Wisata Pantai Desa Watu Karung dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan Tahun 2017. *Jurnal GeoEco*, 4(1), 31-40.
 17. Nurbaeti, Rahmanita, M., Ratnaningtyas, H., & Amrullah. (2021). Pengaruh Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Harga Dan Fasilitas Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan di Objek Wisata Danau Cipondoh, Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 269-278.
 18. Nuryananda, P. F., Mijiarto, J., Alawi, A. M., & Wahyuni. (2023). Desa Wisata Tegaren: Sadewa, Jadesta, Adwi dan Persepsi Sosial Publik Terhadap Kemajuan Desa Wisata. *Tourism Scientific Journal*, Vol. 8, No. 2, <https://doi.org/10.32659/tsj.v8i2.221>.
 19. Nuryananda, P. F., Utami, W. A., Anggresta, P., Darono, P., & Rikza, A. (2021). *Rencana Induk Desa Wisata Tegaren 2019-2031*. Trenggalek: Sahaja.
 20. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Original Edition*. Harvard: Harvard University Press.
 21. Richards, G., & Hall, D. (2000). *Tourism and Sustainable Community Development*. London: Routledge.
 22. Ritchie, B. W. (2009). *Crisis and Disaster Management for Tourism*. Bristol: Channel View Publications.
 23. Russel, C. (2016). Sustainable Community Development-From What's Wrong to

- What's Strong. Exeter, Amerika Serikat.
24. Setyanto, I., & Pangestu, E. (2019). Pengaruh Komponen Destinasi Wisata (4A) terhadap Kepuasan Pengunjung Pantai Gemah Tulungagung. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 71(1), 157-167.
 25. Suksmawati, H., Alawi, A. M., & Nuryananda, P. F. (2022). Virtual Tour dan Pemberdayaan Pesisir sebagai Pengembangan Pariwisata di Desa Kalanganyar, Sidoarjo. *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/159>.
 26. Suksmawati, H., Alidyan, M., Febrianita, R., & Nuryananda, P. F. (2021). Besek Tegaren: ABCD, CBT, dan Glocalisasi dalam Satu Kemasan. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i1.29848>.
 27. Yuwana, S. I. (2022). Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso. *Jurnal Abdimas: Sasambo*, Vol. 4, No. 3, <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735>.